

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin A; Randal J. Elder and Mark S. Beasley. 2008. *Auditing and Assurance Services*, Twelfth Edition. Terjemahan Herman Wibowo. Jakarta.
- Arifianti, H., Payamta, dan Sutaryo. 2013. “*Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)*”. Simposium Nasional Akuntansi XVI. Manado.
- Atyanta, Ramya. 2011. *Analisis Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten X di Jawa Timur)*. Jurnal Ilmiah. hal. 16.
- KPK, 2016, *Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*
- BPK RI, 2016, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) Tahun 2016*
- BPK RI, 2016, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) Tahun 2016*
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2016, *Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2016*
- Badan Pusat Statistik, 2015, *Indeks Pembangunan Manusia 2015*
- Defera, Cris. 2013. *Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Ketidakpatuhan pada Ketentuan Perundang-Undangan terhadap Penentuan Opini*
- Pratikno, Otonomi Daerah : *Peluang dan Tantangan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001)

Riwokaho, Josef, *Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2003).

Wasistiono, Sadu, *Kapita Selekta Pemerintahan*, (Bandung : Fokus Media , 2004).

Wasistiono, Sadu, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, (Bandung : Fokus Media, 2004).

Aturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800-35 Tahun 2016 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

JURNAL

Putu Ratih Pratiwi, Made Pradana Adiputra, Ananta Wikrama T. Atmadja, 2015, *Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Indonesia.

Meyta Anggraeni, I Gusti Ayu Purnamawati, Anantawikrama Tungga Atmadja, 2015, *Pengaruh Pengawasan Keuangan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, Dan Komitmen Manajemen Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

Fatimah, Desi., Ria Nely, M. Rasuli. 2014. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Seluruh Indonesia*. Jurnal Akuntansi, Vol. 3, No. 1, hal.1-15.

Hendarto, Thomas Gatot. 2006. *Analisis penerapan konsep materialitas dan tindak lanjut audit atas suatu ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam pedoman audit BPK atas laporan keuangan daerah*.

SITUS INTERNET

<http://www.bpkp.go.id/>

<http://www.kemendagri.go.id/>

<https://www.bps.go.id/index.php>

<http://jabarprov.go.id/>

<http://www.kemitraan.or.id/>